

SKRIPSI

SUNARTO

**PENGUNAAN KLAUSULA EKSEMSI DALAM
PERJANJIAN KREDIT BANK**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

PENGUNAAN KLAUSULA EKSEMSI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Hj. Moerdiati, S.H., M.S.
NIP. 130 287 031

Penyusun,

Sunarto
NIM. 039710267 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

BAB IV

PENUTUP

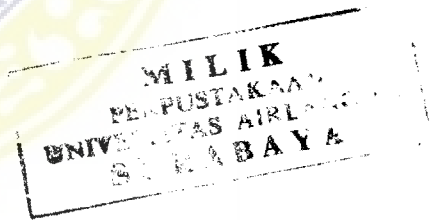
1. Kesimpulan

- a. Dalam perjanjian baku terdapat kelemahan-kelemahan yaitu adanya klausula-klausula yang mencerminkan ketidakadilan dan sangat memberatkan salah satu pihak. Bentuk ketidakadilan ini muncul dalam berbagai bentuk diantaranya yaitu dalam bentuk Klausula pembebasan (*Exemption Clause*).
- b. Terhadap berlakunya perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank, para pihak diberi perlindungan dalam bidang hukum. Bagi pihak debitur dilindungi oleh ketentuan pasal 1321 Burgerlijk Wet Boek (BW) dan ajaran penyalahgunaan keadaan yang digunakan di pengadilan. Ajaran penyalahgunaan ini dapat dijadikan dasar gugatan perjanjian antara debitur dengan bank.

2. Saran

- a. Bank Indonesia (BI) selaku Bank Sentral perlu memberikan pengawasan berkaitan dengan penggunaan perjanjian baku. Di samping itu perlu juga adanya pengaturan yang berisikan arahan dan batasan sehubungan dengan penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank. Pengawasan dan pengaturan tersebut diperlukan agar dalam penggunaan perjanjian baku, bank tidak dengan sewenang-wenang dalam menentukan isi dari perjanjian yang dapat merugikan satu pihak (debitur).

- b. Asas keadilan yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) Burgerlijk Wet Boek (BW) dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan. Dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan ajaran penyalahgunaan keadaan di pengadilan diperlukan peran aktif dari hakim untuk berusaha menemukan dan membentuk hukum.



yang dialihkan. Dan eksekusi terhadap benda persediaan (dagangan) tersebut dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar tersebut.

2. Saran

- a. Mengingat objek jaminan *fidusia* yang berupa benda persediaan (dagangan) tersebut kurang begitu jelas definisinya, maka hendaknya perlu diberikan suatu batasan terhadap benda persediaan (dagangan) yang dapat dijadikan jaminan *fidusia*.
- b. Dalam perjanjian jaminan *fidusia*, debitur (pemberi *fidusia*) berwenang untuk menjual jaminan *fidusia* yang berupa benda persediaan (dagangan), sehingga dalam hal ini debitur (pemberi *fidusia*) hendaknya tidak menyalahgunakan wewenangnya tersebut.